

SILAKNAS ICMI 2006

Dewan Pakar ICMI Pusat

MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

oleh

Ginandjar Kartasasmita

Hotel Mercure-Jakarta, 8 Desember 2006

Bismilaaahirrahmaanirrahiem

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

1. Puji syukur kita panjatkan pada Illahi Rabbi yang telah memberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dan berperanserta dalam Silaturahmi Nasional (Silaknas) ICMI tahun 2006 ini. Acara ini sungguh penting bagi bagi ICMI dan kiranya juga bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Silaknas bukan sekadar acara 'kangen-kangenan' pengurus ICMI, melainkan sebuah sarana untuk mencari pemecahan secara konkret masalah yang dihadapi bangsa, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan yang saat ini benar-benar merupakan persoalan serius bagi kita. Dengan pertimbangan itulah "*Menggerakkan Sektor Riil untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan*" telah dipilih sebagai tema Silaknas tahun ini.

2. Pada kesempatan yang membahagiakan ini saya mewakili Dewan Pakar ICMI akan mengantarkan diskusi dalam Silaknas ini yang akan diisi nanti oleh para menteri, para pejabat serta para pengamat dan pelaku ekonomi. Fungsi kami disini adalah meletakkan pokok-pokok pikiran yang nanti diharapkan akan dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan selama berlangsungnya Silaknas ini.

3. ICMI dilahirkan dari kepedulian terhadap nasib umat dan bangsa. Oleh karena itu, ICMI bertekad untuk senantiasa ikut berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia madani yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, amanah, dan berkeadilan.¹ Visi perjuangan ICMI pada dasarnya adalah visi perjuangan bangsa Indonesia yang untuk tercapainya masih memerlukan perjalanan panjang dan kerja keras karena taraf kehidupan bangsa kita dewasa ini masih berada dalam kondisi yang sangat tertinggal.

Paradoks Pembangunan Ekonomi

4. Perjalanan pembangunan Indonesia memang menunjukkan berbagai hal yang dapat membuat kita optimis, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Kinerja ekonomi Indonesia telah menuju kearah yang lebih stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro. Nilai tukar rupiah berada pada tingkat yang relatif kuat. Tingkat inflasi serta suku bunga perbankan pada posisi yang relatif baik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal terus mengalami penguatan hingga mencapai *level* lebih tinggi dari sebelum krisis. Menguatnya kondisi fundamental keuangan negara juga telah mendorong pemerintah mengambil langkah yang sungguh layak diapresiasi, yakni mempercepat pengembalian hutang pada IMF dari jadwal semestinya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga berada pada tingkat yang relatif baik yakni 5,6 persen di tahun 2005, setelah sempat minus 13 persen pada saat krisis ekonomi ditahun 1997/1998.

¹ Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang memenuhi lima kriteria kualitas, sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak, moral, etika, dan supermasi hukum sebagai resonansi dari kualitas iman dan taqwa. *Kedua*, masyarakat yang mampu berpikir logis (rasional), sistematis, dan konsisten sebagai resonansi dari kualitas fikir, sehingga di samping mampu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan (alam dan sosial) dan teknologi yang berdaya saing tinggi, juga mampu menghargai perbedaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kritis dan demokratis. *Ketiga*, masyarakat yang mampu berkarya dan bekerja secara profesional, efisien, dan produktif berlandaskan pada metode, tehnik, dan cara yang inovatif. *Keempat*, masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sejahtera dengan memenuhi berbagai persyaratannya, seperti: kesempatan kerja, pendapatan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. *Kelima*, masyarakat dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta berketurunan yang berkualitas.

5. Akan tetapi membaiknya indikator makro tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mendasar yakni masalah kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan yang ditargetkan menurun seperti tersebut dalam tujuan MDG's justru pada tahun terakhir ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan yaitu naik dari 16 persen menjadi 17,75 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 39 juta, 10 kali lipat total penduduk Singapura. Kurang lebih sebanyak itu pula jumlah penduduk yang hampir miskin, yang setiap saat dapat terjatuh menjadi warga miskin kembali. Angka pengangguran juga masih berada di atas 10 juta.² Apa yang dapat menjelaskan adanya pertumbuhan dan penguatan ekonomi makro, namun juga bertambahnya kemiskinan dan masih besarnya jumlah pengangguran di sisi lainnya? Inilah paradoks yang terjadi dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini³.

6. Paradoks ini menjadi indikasi adanya persoalan mendasar dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini, sebagaimana pernah terjadi di era sebelum Reformasi 1998. Pembangunan ekonomi saat itu terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan yang semata mengandalkan pada kinerja ekonomi makro, dengan harapan dapat mengatasi kemiskinan melalui mekanisme '*trickle down effect*'. Sepintas harapan tersebut seperti terpenuhi dengan adanya penurunan angka kemiskinan. Tetapi, pada saat yang sama, kesenjangan ekonomi semakin melebar, dan praktek ekonomi semu yang melahirkan ekonomi buih (*bubble*) pun terjadi. Tingkat kerusakan ekonomi Indonesia akibat krisis 1997 lebih dari yang diderita negara lain, mengkonfirmasi adanya kelengahan yang sifatnya mendasar tersebut.

Menegaskan Kembali Pendekatan Pembangunan

7. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan pendekatan pembangunan ekonomi di masa lalu itu. Indonesia memerlukan pendekatan ekonomi yang lebih "pas" untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pasca krisis sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada rakyat, melalui kemampuan untuk mereformasi kelembagaan politik, serta ekonominya. Kesadaran demikian telah dimiliki oleh banyak kalangan di Indonesia termasuk kalangan pemerintah. Namun, adanya paradoks di atas menunjukkan reformasi yang terlaksana baru sebatas di permukaan, dan belum menyentuh secara mendasar pada sistem pengelolaan ekonomi dan sistem kelembagaan.

8. Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu juga telah menyadari pentingnya pendekatan ekonomi yang lebih relevan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melontarkan berbagai konsep ekonomi yang diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan sekaligus. Namun pemerintah tampaknya belum berhasil mengembangkan konsep tersebut dalam program yang utuh dan operasional yang dapat memberikan hasil konkret pada upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebelum berhasil tersebut tampaknya berpangkal pada adanya dominasi cara pandang ekonomi konvensional di lingkungan otoritas ekonomi dan keuangan negara dewasa ini. Paradigma sistem ekonomi konvensional yang telah menimbulkan banyak persoalan di masa lalu itu masih juga berlanjut hingga sekarang, padahal oleh para pakar ekonomi dunia sudah mulai ditinggalkan.

9. Memang ada penjelasan bahwa meningkatnya angka kemiskinan dan masih besarnya pengangguran selama setahun terakhir ini bersifat situasional karena dipicu oleh lonjakan inflasi akhir 2005 dan awal 2006. Inflasi 2005 mencapai 17 persen didesak oleh kenaikan harga BBM, yang dimaksudkan untuk memperkuat struktur keuangan negara. Di awal tahun 2006, inflasi itu terpicu oleh kenaikan harga bahan pangan. Data menunjukkan bahwa sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis

² Tingkat pengangguran saat ini sudah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan. Angka pengangguran terbuka saat ini diperkirakan telah mencapai 10.85 Juta Orang. Bila ditambah dengan pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) dan orang-orang yang bekerja tidak secara formal sesuai kehendaknya (*under unemployment*), maka jumlahnya mencapai 40 Juta Orang. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2006 diperkirakan dapat menyerap sekitar 1,7 juta hingga 1,8 juta angkatan kerja baru. Namun dengan kondisi ini, masih saja tercipta sebesar 300 ribu hingga 400 ribu orang pengangguran dalam angkatan kerja baru. Fenomena pengangguran ini berkaitan langsung dengan lahirnya kelompok miskin dalam masyarakat.

³ Tanda-tanda adanya masalah itu, telah terindikasi juga dalam tingkat pertumbuhan yang walaupun secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 yaitu 5,1 persen, namun sesungguhnya kurang menggembirakan karena adanya penurunan dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2004. Pada triwulan IV/2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1 persen; kemudian melambat menjadi 6,3 persen pada triwulan I/2005; 5,6 persen pada triwulan II/2005 dan triwulan III/2005, bahkan hanya mencapai 4,9 persen pada triwulan IV/2005. Perlambatan ekonomi masih berlangsung hingga triwulan I/2006 dengan pertumbuhan 4,7 persen. Pada triwulan II kembali meningkat menjadi 5,1 persen, triwulan III 5,5 persen. Jika pada triwulan IV pertumbuhan masih tetap berada di bawah 6 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 didapat akan lebih rendah dari tahun 2005.

Kemiskinan sebesar 74,99 persen. Ini berarti bahwa gejala peningkatan harga komoditas makanan berdampak sangat nyata terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dengan mudah terpuruk ke bawah garis kemiskinan, sehingga jumlah kemiskinan pun bertambah dengan cepat. Faktor itulah yang berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan sebanyak 3,95 juta jiwa selama setahun, yakni dari Februari 2005 hingga Maret 2006. Namun apapun juga penjelasannya, kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan bertambah dan pengangguran tidak banyak berkurang.

10. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sisi konsumsi yang keberlasungan (*sustainability*)-nya sulit dijaga. Pertumbuhan belum ditopang sektor riil yang bersifat menyerap banyak tenaga kerja. Untuk tahun 2006, sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,59 persen, sektor pertanian 2,49 persen, dan industri pengolahan 4,63 persen, jauh di bawah sektor-sektor lainnya yang tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen. Berarti pula kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan masih berada di bawah rata-rata ekonomi nasional, padahal sektor-sektor usaha tersebut diharapkan paling banyak dapat menyerap tenaga kerja.

Menggerakkan Sektor Riil

11. Dari uraian diatas, maka keberhasilan dalam penguatan ekonomi makro perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil yang dapat memberi kontribusi konkret dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Menggerakkan sektor riil bukan sekadar meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, akan tetapi sekaligus membuka kesempatan kerja serta menciptakan devisa dari kegiatan ekspor dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Oleh karena itu secara khusus, perhatian harus diberikan pada bidang-bidang yang memiliki peluang dan keunggulan komparatif maupun kompetitif seperti pertanian, industri berbasis pertanian, pariwisata, serta pasar tenaga kerja di manca negara yang harus dialihkan dari pembantu rumah tangga pada tenaga-tenaga terlatih.

12. Pertumbuhan sektor riil saat ini boleh dikatakan mengalami stagnasi, seperti diindikasikan pada perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 25 persen di tahun 2005 menjadi 13 persen tahun 2006. Perbankan tampaknya lebih suka menyimpan dana sebagai Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dibanding menyalurkannya sebagai kredit. Kini diperkirakan sekitar Rp 80 triliun komitmen kredit yang belum direalisasikan. Dana tersebut praktis menganggur bersama dana-dana lainnya sebagai SBI, yang bunganya harus menjadi tanggungan negara, sementara sektor riil sangat kekurangan modal. Maka upaya yang sangat penting bagi tumbuhnya sektor riil adalah memecahkan kebuntuan kredit perbankan, disatu pihak kelebihan likuiditas di bank-bank dan dilain pihak adanya kebutuhan sektor riil akan modal untuk bisa bergerak lebih cepat.

13. Syarat penting untuk menggerakkan sektor riil adalah tersedianya investasi. Terutama investasi langsung, baik dari pihak asing maupun dari dalam negeri. Saat ini kepercayaan investor untuk menanamkan modal secara langsung pada sektor riil masih sangat rendah. Para penyandang modal besar masih lebih memilih untuk menginvestasikan dananya dalam bisnis finansial dan pasar modal yang tidak berdampak banyak bagi sektor riil, dan tidak pula menyerap tenaga kerja. Berbagai persoalan di bidang investasi masih menghambat pengembangan sektor riil, di antaranya masalah perizinan, ketidakpastian dalam penyediaan energi, persoalan ketenagakerjaan yang belum didasarkan pada ketentuan berprinsip *win-win*, serta ketidakpastian penegakan hukum.

14. Prakarsa Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Investasi yang ditujukan untuk meningkatkan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing layak dihargai. Namun muatan dari rancangan tersebut hendaklah lebih mengedepankan kepentingan bangsa, dan jangan memberi kesempatan yang terlalu leluasa kepada pihak-pihak luar untuk menguasai ekonomi nasional dengan dalih "globalisasi ekonomi tidak bisa dihindari". Oleh karena itu, RUU Investasi yang diprakarsai Pemerintah tersebut harus memiliki ketegasan terhadap upaya membangun kemandirian bangsa dan memperkokoh kedaulatan di bidang ekonomi. UU Investasi juga harus mampu mengembangkan *level playing field* bagi semua pelaku bisnis hingga rasa keadilan dalam berekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Juga harus terkait dengan upaya desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Ijin-ijin investasi tidak perlu dipusatkan tetapi harus didelegasikan ke daerah. Pemerintah cukup memberi rambu-rambu atau *guidelines*.

15. Konsep utuh pengembangan sektor riil perlu melibatkan berbagai perspektif sekaligus, termasuk perspektif otonomi daerah. Upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan sektor

riil tidak dapat hanya dilakukan ditingkat pusat, melainkan juga harus di daerah. Daerah apabila diberi kesempatan, dorongan, dan insentif dapat mengembangkan inisiatif untuk membangun sektor riil berbasis potensi lokal, termasuk pertanian dan industri berbasis pertanian sebagai sektor yang paling banyak menampung tenaga kerja, dengan mengaitkannya pada kebutuhan pasar nasional dan global, sebagaimana pengembangan industri pedesaan di China maupun Thailand dan bahkan Vietnam. Kinerja daerah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran semestinya langsung dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang meningkatkan alokasi anggaran bagi daerah. Dengan demikian, setiap tambahan alokasi dana akan mempunyai pengaruh nyata bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Secara khusus otonomi daerah yang riil akan lebih mendukung pengembangan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi non-pemerintah dan non-modal besar dan berbasis sumber daya lokal dan kekuatan masyarakat itu sendiri.

16. Sektor riil berskala mikro, kecil, dan menengah, utamanya yang telah berbentuk koperasi (selanjutnya disebut UMKMK) ini memiliki tantangan yang lebih rumit. Persoalan UMKMK bukan sekadar persoalan iklim investasi, melainkan juga masalah permodalan, keterkaitan dengan sistem pasar, sampai pada persoalan teknologi dan SDM. Padahal UMKMK memiliki kesempatan lebih langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dibanding usaha-usaha padat modal. Jumlah usaha kecil dan rumah tangga mencapai 99,8 persen, sedangkan kemampuan menyerap tenaga kerja dari usaha kecil hingga menengah mencapai 99,4 persen dari angkatan kerja. Menurut sebuah data pada tahun 2005, UMKMK yang tersebar luas di seluruh daerah menyerap 77,7 juta tenaga kerja, dan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) menyumbang 54,2 persen.

17. Aspek permodalan merupakan salah satu penghambat terbesar pengembangan UMKMK seperti juga sektor riil pada umumnya. Namun pada khususnya perbankan enggan melayani UMKMK karena memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk dapat menyalurkan dana yang sama dibanding pada usaha berskala besar. Untuk mengatasi ketimpangan itu, perlu kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan sistem insentif dan disinsentif yang lebih tegas agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan khususnya bagi usaha kecil. Perbankan perlu didorong untuk lebih banyak menyalurkan kredit pada pengembangan UMKMK, dimulai dari yang berada di sekitar kantor cabang masing-masing bank. Insentif khusus perlu diberikan kepada perbankan yang bisa menjemput bola dengan menyalurkan kredit bagi kegiatan usaha yang berkontribusi pada upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Upaya tersebut semestinya merupakan bagian dari sebuah konsep utuh pengembangan sektor riil secara nasional.

Technology and Knowledge Based Economy

18. Pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bagi Prof. Mohammad Yunus dan *Grameen Bank* dari Bangladesh memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pelajaran itu adalah bahwa pendekatan ekonomi makro harus diimbangi dengan pendekatan mikro melalui konsep-konsep pemberdayaan yang dapat membangkitkan perekonomian dan kemandirian rakyat.

19. Di beberapa kawasan Asia seperti Jepang maupun Taiwan, perekonomian rakyat berkembang sehat dan terkait erat dengan sistem perekonomian secara nasional. Secara kelembagaan, perekonomian rakyat tersebut diwakili oleh usaha-usaha kecil yang ditumbuhkan dengan kekuatan yang berbasis pengetahuan dan teknologi (*technology and knowledge based economy-TKBE*) sehingga memiliki daya saing yang kukuh.⁴ Usaha-usaha kecil seperti itulah yang perlu ditumbuhkembangkan di setiap daerah di seluruh Indonesia secara serentak. UMKMK tidak harus berkonotasi ekonomi kumuh, terisolasi dan terbelakang, tetapi dapat berupa ekonomi yang modern, menguasai teknologi, meskipun skalanya kecil dan berlatar belakang budaya dan kearifan lokal.

⁴ *Knowledge-based economy* adalah sebuah sistem ekonomi dimana penciptaan dan eksploitasi pengetahuan merupakan bagian utama untuk mencapai kesejahteraan (*United Kingdom Department of Trade and Industry, 1998*) dan merupakan sistem ekonomi yang menciptakan, mendiseminasi dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. (*World Economic Forum*)

Peranan Lembaga Keuangan Mikro

20. Penumbuhkembangan usaha-usaha kecil seperti itu harus dilakukan dengan cara memecahkan berbagai tantangan teknis maupun struktural. Kualitas dasar SDM serta kapasitas dalam manajemen dan kewirausahaan menjadi persoalan dalam teknik pengembangan usaha-usaha kecil. Demikian pula dalam aspek teknologi. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan baik berupa pelatihan, pendampingan, maupun pemagangan yang dikaitkan dengan struktur atau bangunan sektor riil secara keseluruhan. Dengan demikian upaya pengembangan ekonomi rakyat langsung dikaitkan dengan pemberdayaan SDM serta kelembagaannya sekaligus. Pengalaman *Grameen Bank* dan program pembangunan kita sendiri di masa lalu mengajarkan bahwa upaya pemberdayaan perlu lebih difokuskan pada pemberdayaan perempuan agar memberikan hasil yang lebih efektif bagi upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan ekonomi rumah tangga dan ekonomi masyarakat di lapisan yang paling bawah⁵. Upaya pemberdayaan tersebut perlu dikaitkan dengan pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat sebagai cikal bakal pengembangan kelompok usaha bersama.

21. Tantangan yang lebih berat adalah dalam mengatasi persoalan struktural, termasuk masih terabaikannya secara politis sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga dan industri kecil, dari pusat kendali ekonomi dan politik negara. Di sektor keuangan, tidak ada perbankan yang khusus menggarap kalangan tersebut. LKM berbentuk bank maupun koperasi telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang, akan tetapi LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K) yang saat ini memiliki jumlah lebih besar masih belum memiliki perangkat hukum kuat. Sebagai contoh LKM yang berbasis syariah seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang memiliki potensi besar melayani usaha-usaha kecil termasuk sektor informal, hingga kini belum memiliki payung hukum yang dapat melindungi eksistensi dan kegiatannya. Adanya perundang-undangan yang dapat menjamin eksistensi LKM sungguh merupakan perjuangan yang harus dilakukan oleh ICMI melalui semua jalur yang dapat ditempuh.

Keberpihakan pada Usaha Kecil

22. Persoalan struktural lainnya adalah lemahnya ketentuan yang mengatur persaingan usaha, terutama menyangkut usaha dengan skala berbeda. Sejauh ini, Indonesia cenderung untuk menyerahkan persaingan pada persaingan bebas tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan bagi usaha-usaha kecil untuk mampu membangun pijakan yang lebih kuat bagi terwujudnya mekanisme pasar yang sehat. Misalnya, pembatasan luas lahan perkebunan untuk dapat menumbuhkan bisnis perkebunan berskala menengah banyak dilanggar untuk memberi jalan pintas bagi pengendali kekuatan modal untuk menguasai lahan secara berlebihan. Contoh lain di sektor *retail*, ketidakjelasan ketentuan mengenai pengaturan antar usaha berskala besar, menengah, dan kecil telah menimbulkan persaingan tidak sehat yang mematikan banyak usaha kecil di tingkat rakyat. Antara lain bergugurannya toko-toko kelontong dan warung-warung tradisional, oleh karena tidak mampu bersaing dengan toko-toko yang dimiliki oleh jaringan pengusaha besar waralaba seperti Giant, Carrefour, Indomaret, Alfamart, yang sudah mulai mendesak masuk ke wilayah di luar perkotaan.

23. Keberpihakan secara tegas untuk membangkitkan perekonomian rakyat melalui penguatan sektor riil tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberpihakan tersebut adalah bagian dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi seluruh bangsa. Itulah yang akan menjadi kunci kebangkitan ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kegiatan produksi dan jasa maupun juga peningkatan daya beli, hingga melahirkan struktur usaha yang benar-benar kukuh dan memberi ruang kehidupan yang sehat dan saling menunjang baik bagi usaha kecil maupun bagi usaha besar.

Kebijakan Fiskal

24. Semua kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk kebijakan fiskal yang harus dapat digunakan sebagai instrumen pengendali perekonomian ke arah yang dikehendaki. Pemerintah harus sudah mulai menggunakan kebijakan fiskal yang berpihak pada pertumbuhan sektor riil yang mampu berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Ada sementara pakar yang menilai bahwa sejak tahun 2001 anggaran terus menerus mengalami kontraksi, karena

⁵ Data tahun 2004 menunjukkan pengangguran di kalangan perempuan lebih tinggi yaitu 12.89% dibandingkan laki-laki sebesar 8.11%. Pengangguran di kalangan sarjana perempuan 16.2% dan laki-laki 8.77%.

sebagian yang cukup besar dari dana anggaran harus digunakan untuk membayar hutang. Memang dampaknya seakan baik dalam rangka pengendalian inflasi. Namun harus dipertimbangkan apa dampaknya bagi sektor riil. Banyak ahli berpendapat bahwa dalam masa krisis ekonomi, yang bagi kita belum sepenuhnya berakhir, anggaran justru harus bersifat ekspansif guna memberi ruang gerak yang memadai buat sektor riil, termasuk upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

25. Kita gembira karena Pemerintah sudah tidak akan lagi menyediakan subsidi yang sifatnya konsumtif seperti Santunan Langsung Tunai (SLT). Paket subsidi semacam itu memang sudah selayaknya ditinggalkan karena hanya akan mengakibatkan ketergantungan dan melemahnya semangat dan daya juang. Pemerintah akan menggantikannya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Bantuan Kualitas (PBK). Kita juga gembira mendengar bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,2 persen angka pengangguran menjadi 5,1 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009, Pemerintah menyediakan anggaran PNPM tiga tahun kedepan sebesar Rp14,4 triliun. Presiden dalam sambutan pembukaan Silaknas ICMI kemarin bahkan menyatakan Pemerintah akan menyediakan Rp. 60 Triliun untuk program mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kita harus ikut mencermati seberapa efektif dana itu dimanfaatkan dan bagaimana mekanismenya agar benar-benar berjalan dan menghasilkan sesuai yang diharapkan, dan jangan sampai sebagian besar digunakan untuk biaya "overhead".

Faktor Non-Ekonomi

26. Masalah kemiskinan dan pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mempunyai aspek-aspek non ekonomi. Diantaranya pendidikan dan kesehatan adalah akibat dan juga sekaligus penyebab terjadinya kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan menyebabkan keluarga miskin akan terus berada dalam perangkap kemiskinan. Dewasa ini Indeks Pembangunan Manusia kita berada di urutan ke 110 dari 177 negara, dibawah peringkat Vietnam. Maka program mengatasi kemiskinan dan pengangguran mutlak harus pula mencakup upaya meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan secara simultan.⁶

27. Demikian pula masalah keamanan, stabilitas politik, kepastian hukum, dan *good governance* merupakan faktor non-ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kemandegan sektor riil. Oleh karena itu perbaikan dalam berbagai faktor non-ekonomi tersebut perlu mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dengan perbaikan dalam faktor ekonomi.

Paradigma baru pembangunan

28. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi memadai dengan hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi makro. Keberhasilan secara makro saja tidak akan mampu mengatasi persoalan ekonomi yang mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap tegas untuk menggunakan pendekatan ekonomi alternatif yang bersifat pemberdayaan dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Kesadaran untuk menerapkan pendekatan ekonomi alternatif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan hendaknya tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan harus dapat diimplementasikan secara konkret.

29. Dalam pidato pembukaan Silaknas ICMI kemarin, Presiden SBY telah "menantang" ICMI untuk menjawab pertanyaan kalau paradigma yang bertumpu pada pertumbuhan saja terbukti tidak mampu menghasilkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan; paradigma yang bagaimana yang seharusnya kita kembangkan dalam pembangunan di negeri kita. Maka sebelum mengakhiri presentasi ini marilah kita mencoba menjawabnya, karena masalah ini telah lama menjadi pemikiran kita, dan secara intensif dibahas di dalam Dewan Pakar ICMI, dan juga oleh anggota ICMI melalui diskusi-diskusi di *website*.

30. Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan

⁶ Menurut data BPS tahun 2003/2004, buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 15,5 juta orang dari total penduduk (10,6 juta/67.8%; perempuan). Angka kematian bayi (AKB) 31/1000 kelahiran hidup (Singapura 3/1000, Malaysia 7/1000, Thailand 23/1000, dan Philipina 27/1000). Angka kematian Ibu (AKI) karena kehamilan atau persalinan 307/100.000 kelahiran hidup (HDR Report 2005)

bagi masalah kesenjangan. Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Maka berkembang konsep alternatif yang bertumpu pada keberpihakkan (*affirmative policy*) dan pemberdayaan masyarakat (*enabling* dan *empowering*) dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

31. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

32. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chamber, 1995). Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Friedmann, 1992).

33. Konsep yang ingin kita kembangkan di Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi kita sendiri, tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "*incompatible or antithetical*" (Donald Brown, 1995). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game*" dan "*trade off*". Seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), "*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "*the right kind of growth*", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "*trickle-down*", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*" (Ranis, 1995).

34. Pendekatan pembangunan alternatif ini sekarang telah mulai memasuki arus utama (*mainstream*) pemikiran ekonomi antara lain dengan telah disuarakan pula oleh Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001, dan diperkuat dengan pemberian hadiah Nobel yang sama untuk tahun 2006 kepada Muhammad Yunus. Stiglitz mengatakan bahwa "*Development is not about helping a few people get rich or creating a handful of pointless protected industries that only benefit the country's elite*", tetapi "*Development is about transforming societies, improving the lives of the poor, enabling everyone to have a chance at success and access to health care and education*".

35. Paradigma baru ini bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan justru akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan, karena didukung oleh basis yang kuat dan luas. Konsep serupa ini telah menjadi semacam konsensus dikalangan Dewan Pakar ICMI sebagai pendekatan pembangunan yang bermartabat, berkeadilan, menuju kemandirian dan menjamin berkelanjutan.

Penutup

36. Sebagai penutup, pada akhirnya masalah yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana kita membangun perekonomian berdasarkan azas yang sesuai dengan sifat kemajemukan budaya dan keragaman sumber daya bangsa. Disadari bahwa upaya menemukan kembali jati diri bangsa dan membangun kemandirian ekonomi yang sesuai dengan cita-cita pada saat Republik ini diproklamasikan tidaklah mudah. Sudah terlalu lama dan terlalu jauh kita bergeser dari arah itu, sehingga memutar kembali haluan bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Juga tidak bisa cuma dengan pernyataan-pernyataan dan retorika yang menyenangkan untuk didengar tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tantangan dan lingkungan dunia yang kita hadapi sekarang juga lebih rumit dibanding dipertengahan abad yang lalu pada waktu para pendiri Republik menyusun dasar-dasar negara dan azas-azas bagi pengelolaan negara. Namun, betapapun besar tantangannya kita wajib berusaha dan untuk itu, kita harus membangun konsensus bersama bahwa memang cita-cita itu, meskipun dirumuskan 61 tahun yang lalu adalah masih yang paling tepat buat bangsa kita. Disertai kesadaran bahwa dalam pelaksanaannya kita harus memperhatikan faktor-faktor yang waktu itu masih belum dominan, utamanya lompatan kemajuan teknologi yang mengakibatkan jarak dan tapal batas antar negara tampak sebagai hal yang artifisial, dan menyesuaikan strategi dan kebijakan pada kenyataan dan lingkungan yang berkembang.

37. Sebagai organisasi yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa dan negara, ICMI harus tampil di depan memelopori kebangkitan kesadaran dan gerakan intelektual dalam memetakan kembali arah perjalanan bangsa kedepan. Dalam rangka itu ICMI harus konsisten mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pembelaan yang tegas terhadap pengembangan ekonomi yang sungguh-sungguh berorientasi pada rakyat, yang dapat menumbuhkan kemandirian bangsa Indonesia. Insya Allah pada saatnya bangsa kita akan hidup damai dan sejahtera, sebagai bangsa yang bermartabat, "*gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.*" Amien.

Billaahit taufik wal hidayah

Wassalaamu alaikum wr.wb.

REFERENSI

Brown, Donald. "Poverty-Growth Dichotomy", dalam Üner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press. 1995.

Chamber, Robert. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?", dalam Üner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press. 1995.

Friedman, John. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell. 1992.

Kirdar, Üner dan Leonard Silk (ed.). *People: From Impoverishment*. New York: New York University Press, 1995.

Ranis, Gustav. "Reducing Poverty: Horizontal Flows Instead of Trickle Down", dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed.). *People: From Impoverishment To Empowerment*. New York: New York University Press. 1995.

Stiglitz, Joseph E. "*Globalization and Its Discontents*". W.W. Norton & Company Ltd, New York. 2002